



Pendampingan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Desa Wisata Buntu Datu di Mengkendek Tana Toraja

Wim J. Winowatan^{1*}, I Nyoman Siryayasa², Irva Yulia Rohmah³

¹ Program Studi Tata Hidang, Politeknik Pariwisata Makassar, Indonesia

^{2,3} Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara, Politeknik Pariwisata Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wimjohannes12@gmail.com

Abstract. *The Community Service (PKM) program for the 2025 academic year in Buntu Datu Tourism Village, Mengkendek District, Tana Toraja Regency, aims to enhance the human resources (HR) capacity in managing community-based tourism villages. This village has great tourism potential, supported by basic facilities such as gazebos, halls, camping areas, and food stalls that cater to tourists' activities. However, tourism village management still faces challenges such as limited facilities, low digital promotion skills, lack of innovation in developing tourist attractions, and suboptimal use of village funds to support the tourism sector. The PKM implementation methods involve socialization, training, interviews, field observations, and Focus Group Discussions (FGD) with the community, village officials, and tourism awareness groups (Pokdarwis). Through a participatory approach, this activity successfully improved the community's understanding of destination management, tourist services, facility management, and digital promotion strategies via social media and online platforms. Although the impact was limited due to the relatively short duration of the assistance, the activity received high appreciation from the community and emphasized the importance of collaboration between the community, government, and academics. It is hoped that follow-up programs will strengthen local capacity, enhance tourism attractiveness, and support the sustainable economic welfare of the Buntu Datu Tourism Village community.*

Keywords: *Community Empowerment; Community-Based Tourism; Digital Promotion; Human Resource Development; Tourism Village Management.*

Abstrak. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Akademik 2025 di Desa Wisata Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat. Desa ini memiliki potensi wisata alam yang besar, didukung oleh fasilitas dasar seperti gazebo, aula, area berkemah, dan warung makan yang mendukung aktivitas wisatawan. Meskipun demikian, pengelolaan desa wisata masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas, rendahnya kemampuan promosi digital, dan kurangnya inovasi dalam pengembangan atraksi wisata. Metode pelaksanaan PKM melibatkan sosialisasi, pelatihan, wawancara, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan masyarakat, perangkat desa, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manajemen destinasi, pelayanan wisatawan, pengelolaan fasilitas, dan strategi promosi digital melalui media sosial dan platform daring. Meskipun dampaknya terbatas karena durasi pendampingan yang singkat, kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Diharapkan, program lanjutan dapat memperkuat kapasitas lokal, meningkatkan daya tarik wisata, dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Wisata Buntu Datu secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pengelolaan Desa Wisata; Pengembangan SDM; Promosi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, dengan cakupan wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata. Perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pariwisata yang efektif dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat setempat serta menjadi tolok ukur penting bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa destinasi wisata religi maupun wisata berbasis alam dan budaya yang

unik dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pengoptimalan dan peningkatan peran pemerintah daerah serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengembangan sektor ini melibatkan berbagai pihak, yakni masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata sendiri diartikan sebagai perjalanan sementara dari satu tempat ke tempat lain bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk menikmati perjalanan dan memenuhi berbagai keinginan.

Pengembangan sektor pariwisata harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Murphy dalam Rahim (2012:2), pemangku kepentingan utama dalam pariwisata meliputi tiga pihak, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi dan harus berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Pariwisata juga berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi dan pemersatu bangsa, khususnya melalui penyebaran destinasi wisata ke berbagai pelosok daerah. Studi yang dilakukan oleh Erawan menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah serta memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja di berbagai tingkatan keterampilan, mulai dari tenaga kerja tidak terampil hingga tingkat eksekutif.

Desa Wisata Buntu Datu yang terletak di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan wisata berbasis alam dan budaya. Dikelilingi oleh bentang alam perbukitan dan hutan pinus yang sejuk, desa ini menawarkan pengalaman wisata alam yang autentik, serta didukung dengan kekayaan tradisi budaya Toraja yang masih terjaga. Beberapa fasilitas yang telah tersedia di Desa Wisata Buntu Datu antara lain wahana flying fox, aliran sungai yang dapat dijadikan tempat aktivitas alam, area camping ground di tengah hutan pinus, panggung terbuka untuk pertunjukan seni dan budaya, serta homestay yang sedang dalam proses pembangunan. Fasilitas ini merupakan modal awal yang sangat potensial untuk menarik minat wisatawan dan dikembangkan secara lebih profesional.

Meskipun memiliki kekayaan potensi alam dan budaya yang menjanjikan, pengelolaan pariwisata di Desa Buntu Datu masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keterlibatan masyarakat masih bersifat sporadis, dan belum ditunjang oleh pengetahuan manajerial, pemahaman terhadap prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, strategi pemasaran digital, serta penguasaan standar pelayanan wisatawan.

Selain itu, belum adanya struktur kelembagaan desa wisata yang tertata dengan baik dan belum tersusunnya strategi pengembangan SDM secara komprehensif, menjadi faktor penghambat dalam pengembangan destinasi ini.

Pariwisata berbasis masyarakat yang diwujudkan melalui desa wisata merupakan strategi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah mendorong pengembangan desa wisata sebagai instrumen pelestarian budaya dan pemerataan ekonomi (Sukardi et al., 2021). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas SDM merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan destinasi.

Pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan Desa Wisata Buntu Datu. Melalui pendampingan yang terencana dan sistematis, masyarakat sebagai pengelola diharapkan mampu menyusun paket wisata yang menarik, menjaga kelestarian budaya, dan memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan pasar wisatawan. Pendampingan SDM mencakup pelatihan di bidang hospitality, kewirausahaan lokal, pemanduan wisata, serta promosi digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Nuryanti (2019) yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan desa wisata.

Pengembangan SDM dalam konteks ini tidak hanya menyangkut peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga perubahan pola pikir, penguatan nilai kewirausahaan, serta pemahaman akan prinsip pelayanan dan keberlanjutan. SDM yang unggul akan mampu mengenali dan mengemas potensi lokal menjadi produk wisata bernilai jual serta merancang strategi promosi yang sesuai dengan tren pasar. Dalam jangka panjang, ini akan mendorong terbentuknya kelembagaan yang kuat dan jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan institusi pendidikan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sunaryo (2013), kualitas pembangunan pariwisata daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan SDM. Oleh karena itu, penguatan SDM melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif di Desa Wisata Buntu Datu merupakan kebutuhan mendesak dan strategis dalam rangka menciptakan destinasi wisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kondisi sumber daya manusia pengelola Desa Wisata Buntu Datu di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan? Serta bagaimana bentuk

pendampingan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas pengelola Desa Wisata Buntu Datu di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan?.

Dengan memperhatikan berbagai potensi dan tantangan yang ada, pengembangan Desa Wisata Buntu Datu menuntut adanya pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama kegiatan kepariwisataan. Penguatan kompetensi SDM tidak hanya menjadi syarat keberhasilan pengelolaan destinasi, tetapi juga menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing dalam industri pariwisata yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi pendampingan yang tepat dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Desa Wisata Buntu Datu secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pariwisata

Gilbert (1990) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan rekreasi yang melibatkan perjalanan sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa pariwisata merupakan kegiatan multidimensi dan multidisiplin yang mencakup interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, dan pemerintah. Burkart & Medlik (1974) menyebut pariwisata sebagai perpindahan sementara dari tempat asal ke destinasi untuk tujuan non-ekonomi.

Desa Wisata

Yoeti (2007) mendefinisikan desa wisata sebagai kawasan pedesaan dengan daya tarik alam, budaya, dan buatan yang mampu memberikan pengalaman unik kepada wisatawan. Permenbudpar No. 18 Tahun 2011 menjelaskan desa wisata sebagai integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam struktur kehidupan masyarakat lokal. Arida & Pujani (2017) menegaskan 8 aspek penilaian desa wisata: alam, lingkungan fisik, budaya, infrastruktur, kelembagaan, SDM, kehidupan sosial, dan aksesibilitas. Ciri utama keaslian budaya dan lingkungan, keterlibatan aktif masyarakat, keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Potensi Atraksi Wisata

Witt & Moutinho (1994) menyebut atraksi wisata sebagai motivasi utama wisatawan untuk berkunjung. Fitroh (2017) menambahkan bahwa atraksi dapat berupa keindahan alam, keunikan budaya, maupun hasil buatan manusia. Potensi sendiri merupakan kemampuan yang masih bisa dikembangkan melalui pelatihan, eksplorasi, dan inovasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sutrisno (2010) mendefinisikan pengembangan SDM sebagai proses peningkatan kapasitas dan kompetensi individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Sunaryo (2013) menekankan bahwa kualitas SDM merupakan faktor utama keberhasilan destinasi wisata. Ahmad et al. (2024) menyoroti bahwa pendekatan partisipatif dalam pelatihan pariwisata mampu meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi tantangan industri pariwisata modern.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Kurniawati (2013) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemenpar (2016) menambahkan empat prinsip utama:

- a. *Economically feasible* – layak secara ekonomi
- b. *Environmentally viable* – berwawasan lingkungan
- c. *Socially acceptable* – diterima secara sosial
- d. *Technologically appropriate* – tepat guna secara teknologi.

Community-Based Tourism (CBT)

Sunaryo (2013) menyatakan CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pengelolaan pariwisata. Suansri (2003) menegaskan prinsip CBT meliputi kepemilikan masyarakat, partisipasi aktif, keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan distribusi manfaat yang adil.

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tujuan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pariwisata di Desa Wisata Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Dalam konteks Politeknik Pariwisata, kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan objek dan daya tarik wisata lokal melalui tahapan yang sistematis, meliputi persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan akhir. Tahap persiapan mencakup penyusunan materi pelatihan, pengadaan sarana pendukung, serta koordinasi dengan pihak desa dan pemerintah daerah. Tahap sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, khususnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pemuda desa, untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, serta manfaat kegiatan, sekaligus menyepakati bentuk pelatihan dan waktu pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi pengelolaan desa wisata yang

mencakup aspek hospitality, manajemen destinasi, pemasaran digital, storytelling atraksi lokal, dan penyusunan paket wisata dengan pendekatan partisipatif dan metode learning by doing. Monitoring dilakukan untuk memastikan keterlibatan aktif peserta, sementara evaluasi dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner guna mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Jenis data yang digunakan berupa data primer (hasil wawancara, observasi, dan FGD) serta data sekunder (dokumen, profil desa, dan laporan kegiatan). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi potensi daya tarik wisata Desa Buntu Datu, mengembangkan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan dan pendampingan, serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam tata kelola desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu identifikasi potensi dan kondisi SDM pada Juni–Agustus 2025, serta pendampingan dan pengembangan kapasitas masyarakat pada September–November 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pendampingan

Kegiatan Pendampingan Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Akademik 2025 di Desa Wisata Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja menghasilkan sejumlah temuan penting berdasarkan wawancara dan observasi langsung di lapangan. Desa ini memiliki area yang cukup luas dan bersih, dikelilingi pohon cemara dengan suasana sejuk serta udara yang dingin, sehingga menjadi daya tarik alami bagi wisatawan. Dari sisi fasilitas, Desa Buntu Datu telah memiliki beberapa sarana penunjang seperti beberapa gazebo, warung makan sederhana, toilet, aula, area berkemah, tempat bermain di lapangan yang luas, serta area parkir yang memadai. Meskipun fasilitas masih tergolong terbatas, kondisi lingkungan yang bersih menjadikan desa ini sebagai objek unggulan dengan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Desa Buntu Datu telah menjadi perhatian pemerintah daerah yang berencana memberikan bantuan dana desa wisata, namun hingga saat ini masyarakat belum merasakan bantuan tersebut secara langsung. Dari sisi promosi, pengelolaan wisata masih terbatas pada penggunaan media sosial. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan digital marketing dan manajemen destinasi. Meski demikian, keterlibatan masyarakat setempat cukup aktif melalui koordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam pengelolaan objek wisata.

Sumber pendapatan desa wisata masih terbatas, yakni berasal dari penyewaan aula, warung makan, gazebo, kegiatan berkemah, serta retribusi masuk bagi tamu. Namun, meskipun biaya masuk relatif murah, beberapa pengunjung masih menyampaikan keluhan terkait kebijakan retribusi tersebut. Terlepas dari keterbatasan yang ada, masyarakat setempat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kehadiran dosen Politeknik Pariwisata Makassar yang telah melaksanakan PKM di Desa Buntu Datu. Kegiatan ini dianggap sangat membantu karena memberikan masukan dan saran mengenai cara pengelolaan desa wisata. Namun, masyarakat juga menyampaikan bahwa waktu pendampingan yang singkat menjadi kendala, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal. Selain itu, masih terbatasnya fasilitas wisata menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan daya tarik wisatawan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menyarankan agar kegiatan pendampingan PKM tidak hanya dilaksanakan dalam waktu singkat, melainkan dibuat dalam bentuk program berjangka dengan jadwal minimal enam bulan. Pendampingan yang lebih panjang diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana mediasi antara masyarakat desa wisata dengan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, khususnya dalam memperjuangkan bantuan dana desa wisata. Lebih jauh, jadwal pendampingan yang berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan masyarakat, terutama kelompok sadar wisata, dalam mengelola desa wisata secara lebih profesional, kreatif, dan berkelanjutan.

Sosialisasi Potensi Desa Wisata

Masyarakat, khususnya Pokdarwis dan pemuda desa, telah mendapatkan pemahaman mengenai konsep desa wisata, community based tourism (CBT), dan pentingnya menjaga keberlanjutan budaya serta lingkungan. Sosialisasi meningkatkan kesadaran akan posisi masyarakat sebagai pelaku utama (agent of change) dalam pengembangan desa wisata.

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Peserta mendapatkan pelatihan hospitality dasar, pemanduan wisata, penyusunan paket wisata, storytelling atraksi lokal, hingga strategi pemasaran digital. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan keterampilan pelayanan wisatawan serta kemampuan merancang produk wisata yang lebih menarik.

Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

Melalui diskusi kelompok dan FGD, struktur kelembagaan Pokdarwis mulai terbentuk lebih jelas dengan pembagian peran (ketua, sekretaris, bendahara, seksi promosi, dan seksi atraksi). Adanya komitmen bersama untuk membangun jejaring dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat semakin meningkat, tidak hanya pemuda desa, tetapi juga tokoh adat dan perempuan yang berperan dalam kuliner serta kerajinan lokal. Terjadi perubahan pola pikir masyarakat bahwa pariwisata bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil kegiatan pendampingan di Desa Wisata Buntu Datu menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola desa wisata. Pada tahap awal, masyarakat cenderung memiliki keterlibatan yang sporadis dalam pengelolaan destinasi, namun setelah dilakukan sosialisasi, pemahaman mereka mengenai konsep desa wisata dan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) semakin meningkat. Masyarakat mulai menyadari bahwa pengelolaan desa wisata tidak hanya sekadar menjaga potensi alam dan budaya, tetapi juga membutuhkan keterampilan manajerial, pelayanan wisatawan, serta strategi pemasaran yang terarah.

Temuan dari kegiatan PKM di Desa Wisata Buntu Datu menunjukkan bahwa potensi utama desa ini terletak pada daya tarik alam yang luas, bersih, dan masih asri. Hal ini sejalan dengan pendapat Cooper dkk. (2005) yang menyatakan bahwa salah satu komponen utama dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah atraksi (attractions), baik berupa alam, budaya, maupun buatan manusia. Buntu Datu memenuhi aspek atraksi dengan lanskap hutan pinus, udara sejuk, serta suasana alami yang menjadi kekuatan daya tarik wisata. Namun, aspek amenities (amenities) dan layanan pendukung (ancillary services) masih sangat terbatas, misalnya fasilitas sederhana seperti gazebo, toilet, aula, dan warung makan. Keterbatasan fasilitas ini membuat kualitas pengalaman wisatawan belum sepenuhnya optimal sebagaimana prinsip 6A Buhalis (2000) dalam pengembangan destinasi wisata.

Dari sisi pengelolaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Pokdarwis Desa Buntu Datu telah berperan sebagai penggerak utama dalam tata kelola desa wisata. Hal ini selaras dengan konsep Community Based Tourism (CBT) sebagaimana dikemukakan Sunaryo (2013), di mana masyarakat lokal menjadi subjek utama pembangunan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam penyewaan aula, pengelolaan warung makan, hingga partisipasi dalam kegiatan berkemah menunjukkan adanya kesadaran untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang ekonomi. Namun, tingkat partisipasi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas SDM, terutama dalam manajemen destinasi dan pemasaran digital. Kondisi ini sejalan dengan temuan Widari dkk. (2022) yang menekankan bahwa keterbatasan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat sering kali menjadi penghambat dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.

Dari sisi promosi, penggunaan media sosial sudah dilakukan namun masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menguasai strategi destination branding sebagaimana dijelaskan Wicaksono (2022), yang menekankan pentingnya promosi kreatif dan konsisten untuk membangun citra desa wisata. Minimnya kemampuan digital marketing masyarakat juga berimplikasi pada jangkauan promosi yang kurang luas. Akibatnya, meskipun Desa Buntu Datu memiliki potensi besar, arus kunjungan wisatawan belum stabil dan sumber pendapatan masih terbatas.

Selain itu, fakta bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian melalui rencana bantuan dana desa wisata, namun belum terealisasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Kemenpar (2016), yang menekankan pentingnya dukungan multi-stakeholder, termasuk pemerintah, dalam menjaga kesinambungan destinasi. Dengan kata lain, keberhasilan Desa Buntu Datu tidak hanya ditentukan oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh sinergi dengan pemerintah daerah, swasta, dan institusi pendidikan.

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen Poltekpar Makassar memberikan kontribusi positif sebagai upaya pendampingan awal. Namun, keterbatasan waktu pelaksanaan membuat dampak kegiatan belum sepenuhnya optimal. Hal ini sejalan dengan model pendampingan menurut Korten (1987), yang menekankan bahwa pendampingan efektif harus bersifat partisipatif, berkesinambungan, dan berbasis praktik langsung (*learning by doing*). Oleh karena itu, usulan masyarakat agar PKM dilakukan secara berjangka minimal enam bulan menjadi relevan dan mendukung penguatan kapasitas SDM secara lebih mendalam.

Pelatihan yang diberikan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan teknis masyarakat. Materi mengenai hospitality, penyusunan paket wisata, pemanduan, hingga pemasaran digital berhasil meningkatkan kepercayaan diri pengelola dalam berinteraksi dengan wisatawan. Peserta juga mulai mampu mengemas potensi lokal menjadi produk wisata yang bernilai jual, misalnya menggabungkan wisata alam hutan pinus dengan atraksi budaya Toraja sebagai paket wisata tematik. Hal ini sejalan dengan teori Sunaryo (2013) bahwa kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata.

Selain itu, kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD) mendorong terbentuknya struktur kelembagaan Pokdarwis yang lebih tertata. Pembagian peran yang jelas antara pengurus menjadi langkah awal untuk menciptakan tata kelola destinasi yang lebih profesional. Hal ini

penting karena kelembagaan yang kuat merupakan fondasi dalam membangun jejaring dengan pemerintah daerah maupun pelaku industri pariwisata. Peningkatan partisipasi masyarakat juga terlihat dari keterlibatan pemuda, tokoh adat, hingga kelompok perempuan yang mengambil peran dalam sektor kuliner dan kerajinan lokal.

Dari sisi pemasaran, meskipun sudah ada peningkatan pemahaman terkait digital marketing, keterampilan ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Tantangan utama terletak pada konsistensi penggunaan media sosial dan kemampuan membuat konten yang menarik sesuai dengan tren wisata. Dengan dukungan berkelanjutan, keterampilan ini dapat menjadi kunci dalam memperluas jangkauan promosi Desa Wisata Buntu Datu.

Hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Desa Buntu Datu mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan pariwisata, namun masih terkendala dalam hal manajemen dan pemasaran. Ketua Pokdarwis menyatakan, *“Kami sudah berusaha menjaga kebersihan area wisata, tetapi karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya dukungan dana, pengelolaan belum maksimal. Promosi hanya bisa lewat Facebook atau WhatsApp, karena kami belum terlalu paham cara promosi yang lebih luas.”* Kutipan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi alam yang dimiliki desa dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memasarkan objek wisata.

Selain itu, wawancara dengan salah satu pemuda desa yang aktif dalam kegiatan wisata juga menegaskan permasalahan yang sama. Ia mengatakan, *“Kami senang ada pengunjung yang datang untuk berkemah, tapi pendapatan hanya dari sewa aula dan gazebo. Kalau ada bantuan untuk pelatihan digital marketing atau pengelolaan wisata, kami bisa lebih mandiri.”* Hal ini menguatkan temuan bahwa kendala utama bukan pada kurangnya potensi, melainkan keterbatasan kapasitas SDM dalam mengembangkan desa wisata secara profesional.

Temuan wawancara ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Fitriani & Putra (2020), yang menegaskan bahwa *“keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada kualitas SDM pengelolanya, terutama dalam aspek hospitality, manajemen, dan pemasaran digital. Artinya, meskipun Desa Buntu Datu sudah memiliki daya tarik alam dan budaya yang kuat, pengembangan tidak akan optimal tanpa adanya peningkatan kapasitas masyarakat.”*

Lebih jauh, adanya apresiasi dari masyarakat terhadap kegiatan PKM yang dilakukan dosen Poltekpar Makassar juga menjadi bukti bahwa pendampingan eksternal memiliki peran penting. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan, *“Kami berterima kasih atas saran yang diberikan dosen, karena banyak hal yang sebelumnya tidak kami pikirkan. Sayangnya, waktu pendampingannya sangat singkat, padahal kalau lebih lama mungkin hasilnya lebih terasa.”* Pernyataan ini memperkuat konsep pendampingan menurut Supriatna (2011) dan Korten

(1987) yang menekankan pentingnya proses berkesinambungan serta praktik langsung dalam membangun kemandirian masyarakat.

Secara keseluruhan, pendampingan yang dilakukan terbukti efektif dalam membangun kapasitas SDM pengelola desa wisata. Pendekatan partisipatif yang digunakan mampu menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan kesadaran bahwa pariwisata bukan hanya sektor hiburan, melainkan juga instrumen peningkatan ekonomi lokal. Namun, untuk mewujudkan keberlanjutan, diperlukan tindak lanjut berupa program pelatihan lanjutan, monitoring, serta dukungan dari pemerintah daerah agar Desa Wisata Buntu Datu mampu menjadi destinasi unggulan yang berdaya saing.

Selanjutnya hasil kegiatan PKM di Desa Wisata Buntu Datu memperlihatkan bahwa potensi alam dan budaya yang dimiliki desa ini sudah cukup kuat untuk menjadi daya tarik wisata unggulan, namun keterbatasan fasilitas, kapasitas SDM, serta dukungan kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Keterlibatan aktif masyarakat melalui Pokdarwis telah menjadi modal sosial penting, meskipun masih membutuhkan penguatan dari sisi manajerial dan pemasaran digital. Dengan demikian, PKM ini bukan hanya memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga menegaskan urgensi adanya program pendampingan jangka panjang yang sistematis untuk mewujudkan Desa Wisata Buntu Datu sebagai destinasi yang kompetitif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tahun Akademik 2025 di Desa Wisata Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Lingkungan yang bersih, udara sejuk, serta fasilitas sederhana seperti gazebo, aula, area berkemah, dan warung makan menjadi modal penting dalam menarik wisatawan. Namun, keterbatasan sarana, rendahnya kapasitas SDM, serta minimnya dukungan kelembagaan dan dana desa masih menjadi tantangan utama. Masyarakat melalui Pokdarwis menunjukkan antusiasme tinggi untuk berpartisipasi, tetapi masih membutuhkan pendampingan teknis dalam aspek hospitality, pemasaran digital, dan manajemen destinasi. Kehadiran tim dosen Politeknik Pariwisata Makassar mendapat apresiasi positif karena memberikan wawasan baru meskipun waktu pelaksanaan yang singkat membatasi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, disarankan agar pendampingan dilakukan secara berkelanjutan selama minimal enam bulan agar transfer keterampilan lebih efektif. Selain itu, PKM diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan dukungan dana dan penguatan kelembagaan.

Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas SDM, memperluas promosi wisata berbasis digital, serta mewujudkan Desa Wisata Buntu Datu sebagai destinasi unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Andreis, F. D., & Carioni, M. (2019). A critical approach to the tourism management. *Open Journal of Applied Sciences*, 9, 335–341. <https://doi.org/10.4236/ojapps.2019.95027>
- Arida, I., & Pujani, L. K. (2017). Kajian penyusunan kriteria-kriteria desa wisata sebagai instrumen dasar pengembangan desa wisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 1–9.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Burkart, A. J., & Medlik, S. (1981). *Tourism: Past, present and future*. Heinemann.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2005). *Tourism principles and practice*. Pearson Education.
- Fitriani, D., & Putra, I. N. A. J. (2020). Pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 87–98.
- Gilbert, D., & Cooper, C. (1990). Conceptual issues in the meaning of tourism. In C. Cooper (Ed.), *Progress in tourism, recreation and hospitality management* (Vol. 2, pp. 4–27). Belhaven Press.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125. Sekretariat Negara.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2011). *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata*. <https://peraturan.infoasn.id/peraturan-menteri-kebudayaan-dan-pariwisata-nomor-km-18-hm-001-mkp-2011/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Pedoman umum pengembangan desa wisata berbasis masyarakat*. Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
- Korten, D. C. (1987). *Getting to the 21st century: Voluntary action and the global agenda*. Kumarian Press.
- Krueger, R. A. (2014). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). Sage Publications.
- Maarif, S. D. (2021). Mengenal teori pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. *Tirto.id*. <https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, perspective and challenges of rural tourism*. Gadjah Mada University Press.
- Nuryanti, W. (2019). Community-based tourism dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Pariwisata*, 6(2), 115–124.
- Raharjo, P. (2020). *Modul Tema 14: Kenali dirimu*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi, A., Yudhistira, D., & Amalia, N. (2021). Strategi pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat. *Tourism Development Journal*, 9(1), 45–56.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Supriatna, N. (2011). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pendidikan*. Refika Aditama.
- Sutopo, H. B., & Arief, A. (2020). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian ilmu sosial dan pendidikan budaya*. UNS Press.
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana Prenada Media.
- Tana Toraja Regency Government. (2022). *Profil Desa Buntu Datu Kecamatan Mengkendek*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.
- UNESCO. (2020). *Rural tourism and local development*. UNESCO Publishing.
- UNWTO. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. World Tourism Organization.
- Wibowo, A. (2021). Pemberdayaan SDM dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3843>
- Wicaksono, S. (2022). *Destination branding strategy dalam membangun desa wisata sebagai upaya pemulihan sektor wisata* [Skripsi, Institut Pertanian Bogor].
- Widari, I. G. A., Wulandari, N. K. S., & Ariastita, K. D. (2022). Pemberdayaan SDM dalam pengelolaan desa wisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(3), 133–145.
- Yoeti, O. A. (2007). *Desa wisata: Sebuah alternatif pengembangan pariwisata*. Pustaka Pelajar.